

BAB IV

PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

Kerjasama KPK dan CPIB dalam pemulihan asset SKK Migas di bawah kerangka ASEAN menggunakan platform ASEAN PAC dan ASEAN MLA sebagai landasan normatif bagi Indonesia dan Singapura dalam menjalin kerjasama bilateral. Mekanisme yang dilakukan dalam kerjasama tersebut dilakukan telah diatur dalam kerangka ASEAN mulai dari identifikasi dan pelacakan asset, pertukaran informasi, penyitaan dan pembekuan asset, hingga pemulihan asset, sehingga memudahkan proses kerjasama KPK dan CPIB.

Perbedaan regulasi antara Indonesia dan Singapura yang menjadi hambatan terjalinnya kerjasama dapat diminimalisir dengan kerangka ASEAN yang selalu menekankan penguatan kolaborasi antar negara anggota dalam menangani kejahatan lintas batas melalui pengadaan pertemuan rutin ASEAN PAC.

Kerjasama KPK dan CPIB dalam pemulihan asset SKK Migas di bawah kerangka ASEAN, juga mencerminkan adanya konsep multiple channel, dimana dalam kerjasama ini negara bukan satu-satunya pelaku utama interaksi namun juga melibatkan Lembaga internasional.

4.2 SARAN

Untuk meningkatkan efektivitas kerja sama antara KPK dan CPIB dalam kerangka ASEAN, diperlukan beberapa langkah strategis. Pertama, Indonesia dan Singapura perlu mempercepat ratifikasi perjanjian Mutual Legal Assistance (MLA)

bilateral untuk mengurangi ketergantungan pada mekanisme informal dan memperkuat dasar hukum kerja sama lintas negara. Kedua, harmonisasi regulasi regional di bawah kerangka ASEAN harus didorong, terutama dalam aspek hukum terkait pemberantasan korupsi seperti penyitaan aset dan perlindungan data, guna mempermudah koordinasi dan mengurangi hambatan teknis akibat perbedaan sistem hukum nasional. Ketiga, kapasitas lembaga antikorupsi seperti KPK, CPIB, dan lembaga serupa di ASEAN perlu ditingkatkan melalui pelatihan bersama, berbagi teknologi, dan penguatan teknik investigasi keuangan, sehingga dapat mengatasi keterbatasan sumber daya dan kompleksitas kasus korupsi lintas batas.

Terakhir, ASEAN perlu menunjukkan komitmen yang lebih kuat terhadap pemberantasan korupsi melalui pembentukan mekanisme pengawasan yang mengikat bagi negara anggotanya. Hal ini tidak hanya akan meningkatkan kredibilitas ASEAN sebagai institusi regional, tetapi juga memastikan keberlanjutan upaya kolektif dalam menciptakan pemerintahan yang bersih dan stabilitas ekonomi di kawasan. Dengan langkah-langkah ini, kerja sama internasional dalam pemberantasan korupsi di ASEAN diharapkan menjadi lebih efektif dan memberikan hasil yang signifikan.